

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berperan strategis dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan sebagai salah satu pilar dalam menjaga stabilitas nasional sejak zaman orde lama dan berjalan hingga saat ini. Pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi ketika sektor pertanian unggul. Sebagai sektor unggulan utama yang harus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab ketersediaan pangan. Sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan merata, adil serta berkelanjutan yang didasari oleh kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Pemerintah mengutamakan produksi Pangan dalam negeri yang diwujudkan melalui pengembangan pangan lokal sebagai upaya Pemenuhan konsumsi dan kebutuhan pangan dimulai dari perseorangan, rumah tangga bahkan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai isu global, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang besar kepada semua lini kehidupan. Termasuk mengancam kerawanan pangan bagi negara di seluruh belahan dunia. Adapun yang mendasarinya yaitu berasal dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan pemenuhan pangan. Selain itu peralihan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri, secara tidak langsung berkaitan dengan produksi pangan. Ketergantungan pasokan pangan suatu daerah terganggu ketika ketersediaan pangan yang lebih kecil atau dengan jumlah produksi pangan terbatas

dibandingkan jumlah masyarakat. Agar terhindarkan dari ancaman kelaparan, negara membutuhkan pangan yang harus mampu dijaga ketersediaanya.

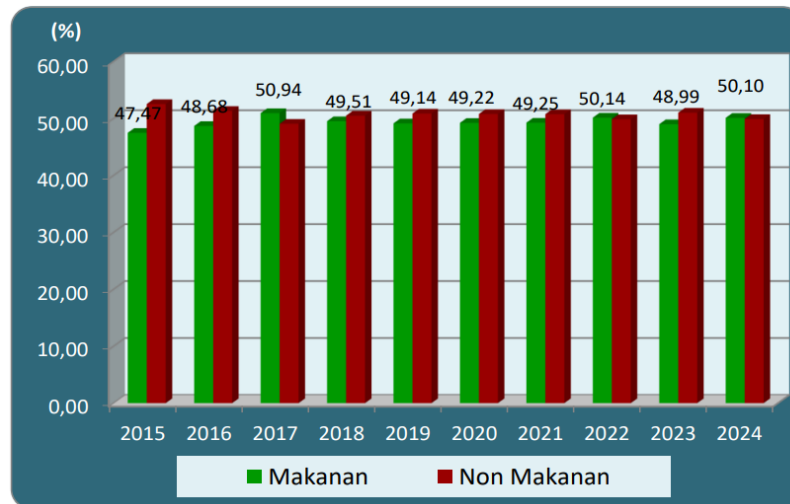
Peningkatan jumlah penduduk di tahun 2045 dengan perkiraan mengalami peningkatan hingga 319 juta jiwa sehingga penting untuk memperhatikan Ketahanan pangan (BPS, 2020). Sejalan dengan perkiraan tersebut, saat ini Indonesia termasuk mewakili dunia sebagai populasi penduduk terbesar berada di menduduki ke-4 secara global. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk seiring dengan pergantian tahun memiliki rata-rata sebesar 1,00 % per tahun (Dita & Legowo, 2022). Capaian pada tahun 2024 sejumlah 281,6 juta jiwa penduduk (BPS, 2024). Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya dinamika ekonomi menimbulkan tekanan baru terhadap ruang, sementara ketersediaan lahan tidak bertambah (Priambodo & Chabibi, 2021).

Indonesia dikenal sebagai negara memiliki sumber daya alam dan tanah yang subur yang berlimpah dari sabang hingga merauke. Hal tersebut menjadikan sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagai petani. Peranan sektor ini sebagai penghasil pangan di Indonesia menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia (Salasa, 2021). Komoditas pangan lokal potensial terdiri dari: Ubi, Jagung, dan lain-lain. Pada realitanya meskipun telah tersedia beragam komoditas pokok, tidak dapat dipungkiri dengan pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih dan lebih dominan mengonsumsi kelompok padi-padian, lemak, dan hewani dibandingkan dengan konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah (Badan Pangan Nasional, 2024).

Namun bukan berarti keadaan tersebut masyarakat menjadi lebih mudah dan terjangkau dalam mengakses pangan (Salasa, 2021). Peningkatan kebutuhan pangan dengan keterbatasan penyediaan komoditas pangan lokal yang menyebabkan suatu negara harus melakukan impor saat terjadi kekurangan atau tidak mencukupi untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sehingga hal tersebut mengharuskan untuk melakukan impor pangan, seiring dengan tingkat konsumsi masyarakat yang berlebihan hingga mengakibatkan ketergantungan komoditas pokok dari negara lain. Bukan berarti keadaan tersebut masyarakat menjadi lebih mudah dan terjangkau dalam mengakses pangan.

Konsumen di negara-negara berpenghasilan rendah menghabiskan proporsi anggaran mereka yang lebih besar untuk makanan dibandingkan dengan konsumen di negara-negara berpenghasilan tinggi. Di negara-negara Afrika dan Asia Selatan berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk makanan mencapai lebih dari 40 persen dari total pengeluaran konsumen pada tahun 2022. Di Negara Nigeria, Kenya, Myanmar, dan Bangladesh, lebih dari 50% pengeluaran konsumen dialokasikan untuk makanan. Hal ini kontras dengan negara-negara berpenghasilan tinggi di Amerika Latin, termasuk Argentina, Kolombia, dan Meksiko, di mana rata-rata sekitar 22,5 persen anggaran dihabiskan untuk belanja (Valdes, 2023). Selama 25 tahun terakhir, 20% rumah tangga termiskin di Amerika Serikat menghabiskan antara 28,8% - 42,6% dari pendapatan mereka untuk makanan, dibandingkan dengan 6,5% hingga 9,2% yang dihabiskan oleh 20% rumah tangga terkaya (Grey, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan pangan membutuhkan pengeluaran yang sesuai dengan berbagai macam kondisi penduduk Indonesia. Sebagai berikut presentase penduduk Indonesia pada pengeluarannya digunakan untuk makanan dan juga bukan makanan:



Gambar 1. 1 Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2015 – 2024

Sumber: Kementerian Pertanian (2025)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pengeluarannya sebagian besar dialokasikan untuk makanan dan minuman. Pada tahun 2024 pengeluaran pada setiap bulan yang digunakan sebesar 50,10% mengonsumsi makanan dan sebesar 49,90% bukan makanan. Data tahun 2024 menampilkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan mencapai Rp 751.789 untuk kebutuhan pangan dan Rp 748.767 untuk kebutuhan non pangan. Dalam analisis ketahanan pangan, proporsi pengeluaran yang relatif kecil untuk makanan umumnya dipahami sebagai tanda bahwa rumah tangga memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil dan akses pangan yang lebih aman; sebaliknya, semakin besar porsi belanja pangan, semakin rentan kondisi ketahanan pangan suatu

keluarga atau individu (Kementrian Pertanian, 2025). Karena proporsi tersebut biasanya menurun ketika pendapatan meningkat, harga pangan stabil, dan akses terhadap pangan semakin mudah.

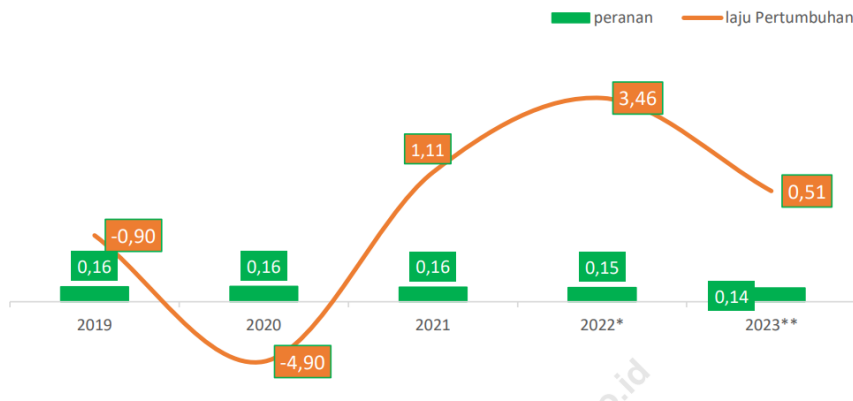
Provinsi Jawa Timur berada di ujung pulau jawa dengan luas wilayah 48.033 km² sebagai provinsi terluas kedua memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2018 dijuluki sebagai lumbung padi nasional sebagai wilayah yang menghasilkan sekaligus memproduksi komoditas pangan utama yaitu padi dan jagung. Sehingga menjadikan provinsi ini memiliki status sebagai tumpuan ketahanan pangan nasional, penyedia ketersediaan pangan baik untuk wilayah di dalam maupun di luar Jawa Timur (Rochmah & Ratnasari, 2019). Selain itu, juga sebagai produsen penghasil komoditas sayur dan buah yang menjadi aspek penting dalam ketahanan pangan. Ketika konsumsi sayur dan buah yang rendah secara tidak langsung dapat melemahkan pemanfaatan pangan menjadi tidak optimal dalam ketahanan pangan.

Adapun aspek ketahanan pangan berkaitan dengan akses terhadap pangan, ketersediaan akan pangan dan pemanfaatan pangan tersebut. Jika ditinjau dari standar nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di tingkat provinsi bahwa memiliki status ketahanan nilai yang baik hingga sangat baik diatas kisaran rata-rata yang ditetapkan (Badan Pangan Nasional, 2024). Meskipun demikian tetap memerlukan perhatian untuk masa yang akan datang, apabila ketersediaan lahan untuk produksi pangan terbatas akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Bahkan bukan hanya di kawasan perkotaan, di wilayah yang dikenal sebagai sentra produksi pertanian pun proses alih fungsi lahan menjadi area permukiman kian sulit dibendung (Roidah, 2014). Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan

permukiman dan industri sebagai salah satu faktor produktivitas pertanian nasional tidak dapat mengimbangi pertumbuhan populasi dan permintaan. Terutama ketika terjadi perubahan iklim dengan hasil panen yang tidak menentu.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sangat baik, termasuk dalam kategori sepuluh besar pada tingkat kota yang menduduki peringkat ke-enam dengan skor 92,14 (Badan Pangan Nasional, 2024). Posisi strategis sebagai akses utama di ujung utara Jawa Timur yang terhubung dengan pelabuhan, selain itu terdapat akses jalan tol memudahkan untuk pendistribusian komoditas pangan lokal menjadikan kota Surabaya memiliki ketahanan pangan aman. Selain itu, sebagai kota kegiatan perdagangan dan jasa, sehingga dalam struktur perekonomian kota, sektor pertanian relatif terbatas dikarenakan keterbatasan lahan untuk aktivitas pertanian. Pembangunan yang begitu masif tidak menutup kemungkinan penggunaan lahan berupa ladang atau sawah lahan yang tersisa kurang lebih sekitar 1000 hektar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tambahan indikator nilai yang dihasilkan atau berkontribusi dari berbagai aktivitas ekonomi sektor pertanian tetap memiliki peranan strategis, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan lokal serta berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Surabaya (Persen), 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2024)

Berdasarkan gambar 1.2 mengetahui bahwa Pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, perikanan dan kehutanan mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga 2023 yang dinilai dengan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan PDRB dari sektor pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi. Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian juga dilihat dari bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan pangan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di wilayah suatu daerah.

Meskipun demikian tidak mudah dalam tantangan ketahanan pangan karena menjadikan kota Surabaya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota. Dapat mengganggu rantai pasok atau harga bahan pangan naik terutama saat menjelang hari-hari besar yang berdampak bagi seluruh masyarakat baik itu kelas atas, menengah hingga, kebawah. Rumah tangga dengan pendapatan terbatas dan ketidakpastian pendapatan dengan fluktuasi harga pangan yang tidak stabil dapat mempengaruhi pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih rentan

mempengaruhi akses pangan mereka. Sehingga memerlukan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian pangan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat ditujukan bagi pemerintah daerah untuk urusan daerahnya dan kepentingan mengatur sendiri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu inovasi yang menyesuaikan dengan masing-masing kondisi daerah. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud dengan cepat apabila terdapat sasaran inovasi daerah. Pada umumnya pertanian identik dengan wilayah pedesaan memiliki lahan luas, tanah yang subur. Sejalan dengan zaman yang juga semakin berkembang menghadirkan sebuah inovasi untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan Kota Surabaya. Inovasi tersebut salah satunya yaitu *Urban Farming* atau pertanian perkotaan.

Tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah bahwasanya dalam menjalankan otonomi daerah, Ketahanan pangan sebagai salah satu bidang yang termasuk dalam urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya bertugas melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Melalui program *Urban Farming* sebagai bentuk mewujudkan ketahanan pangan dan kebutuhan akan pertanian Kota Surabaya. Mengenai *Urban Farming* juga memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 disebutkan dari luas wilayah kota sebesar 30% harus

dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan di antaranya 10% merupakan Ruang Terbuka Hijau privat seperti lahan pekarangan/halaman rumah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada awalnya program *Urban Farming* ditujukan bagi masyarakat pra-sejahtera sebagai upaya awal untuk membekali mereka keterampilan dalam membudidayakan tanaman. Hasil budidaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjadi pijakan awal bagi peningkatan kesejahteraan mereka (Wardah & Niswah, 2021). Kemudian praktik ini dikaitkan dengan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan segar, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menutup ketercukupan pangan agar memperkuat ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Termasuk menjaga kualitas hidup dengan memperbaiki konsumsi menjadi lebih berkualitas bagi masyarakat. Dalam proses menciptakan masyarakat yang berdaya kewajiban pemerintah ada dalam kehidupan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini guna untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Terdapat 5 penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuannya meliputi: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto (1997) dalam La Patilaiya et al., (2022) Pendekatan ini penting untuk menganalisis dinamika dukungan, kapasitas, perlindungan, dan keberlanjutan *Urban Farming*

Sejalan dengan Peraturan Walikota Surabaya No.14 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan melalui Dinas/Badan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap

penyelenggaraan atas pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Berkaitan dengan pertanian perkotaan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya bertugas dalam program *Urban Farming*, bagi masyarakat pengadaan sarana pertanian perkotaan ini termasuk melalui lembaga kemasyarakatan (RT, RW, Karang Taruna, LPMK, PKK tingkat Kelurahan/Kecamatan dan kelompok lansia) tindakan *Urban Farming* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Tabel 1.1 Lokasi Kegiatan *Urban Farming* Kota Surabaya

No	Wilayah	Kecamatan
1.	Surabaya Timur	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Sukolilo
		Kecamatan Tambaksari
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
2.	Surabaya Pusat	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Genteng
		Kecamatan Simokerto
		Kecamatan Tegalsari
3.	Surabaya Barat	Kecamatan Asemrowo
		Kecamatan Benowo
		Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
4.	Surabaya Selatan	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
		Kecamatan Karangpilang
		Kecamatan Sawahan

Sumber: Wardah & Niswah (2021)

Berdasarkan tinjauan dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya penerapan program *Urban Farming* ini tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Surabaya ini. Secara menyeluruh dari wilayah-wilayah tersebut kemudian dilakukan pemetaan

diantaranya terdapat 11 Kampung yang lokasinya berada di kecamatan dan kelurahan yang berbeda-beda. Sebelas Kampoeng tersebut terpilih untuk pengembangan Kampoeng oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya karena dinilai sebagai Kampung yang memiliki potensi unggulan pengelolaan *Urban Farming* dinamakan dengan Kampung Sayur Suroboyo. Sebagai upaya pengembangan Kampung Sayur Suroboyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan pemberdayaan masyarakat oleh motivator yang berasal dari bidang pertanian. Masing-masing motivator memberdayakan masyarakat tiga sampai empat Kampung. Sebagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai regulator bertindak dalam pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam program *Urban Farming*.

Pemenuhan kebutuhan pangan dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari adanya serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, pendampingan, dan Pengawasan, menciptakan kesadaran kolektif dikalangan masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan mereka (Marlyana & Cuhanazriansyah, 2025). Kerena wilayah perkotaan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori urban. Keberhasilan program *Urban Farming* sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Kampoeng dengan aktif melakukan budidaya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menetapkan tiga komponen *Urban Farming* yang meliputi pertanian, perikanan dan peternakan. Pendekatan tersebut dengan minimal dua komponen yaitu: pertanian dan perikanan, pertanian dan peternakan, perikanan dan peternakan.

Kampoeng Oase Ondomohen merupakan bagian dari Kampung Oase Ondomohen Sayur Suroboyo yang menerapkan *Urban Farming* berlokasi strategis berada di pusat kota Surabaya lebih tepatnya di Jalan Ondomohen Magersari V RT 08, RW 07 Kelurahan Ketabang, Genteng. Keunggulan sebagai potensi yang dimiliki ditinjau dari pengelolaan lingkungan sekaligus menjadi pelopor pertama *Urban Farming* di wilayah perkotaan dengan pemanfaatan lahan yang dapat dikatakan tidak terlalu besar antara rumah yang berhadapan antara satu dengan yang lainnya. *Urban Farming* bukan hanya dapat dilakukan di depan rumah pribadi saja melainkan pemanfaatan dapat menggunakan ruang sisa di tepi jalan untuk ruang hijau yang produktif. Masyarakat Kampoeng Oase Ondomohen ini selain membuat *Urban Farming* di pekarangan rumah yang sempit mereka juga memanfaatkan tepi jalan lebih atau berada disamping rumah mereka. Secara keseluruhan *Urban Farming* yang ada di Ondomohen ini memiliki sekitar 300 lubang hidroponik, akuaponik dan vertikultur dan lain-lain.

Kampoeng Oase Ondomohen ini memiliki konsep Kampoeng sister yang terdiri dari tiga Kampoeng Oase. Dalam pengembangan *Urban Farming* secara komoditas Kampoeng Oase Ondomohen ini lengkap meliputi: pertanian, perikanan dan peternakan. Pada komponen pertanian terdapat berbagai jenis metode yang digunakan budidaya tanaman untuk mengatasi keterbatasan lahan, meliputi: Vertikultur. Kampoeng Ondomohen melakukan budidaya tanaman Hidroponik, Vertikultur, Akuaponik dan lain-lain yang berjajar berada di sepanjang jalan Kampoeng Oase Ondomohen.



Gambar 1.3 Tanaman Hidroponik Kampoeng Oase Ondomohen Kota Surabaya
Sumber: Kampoeng Oase Ondomohen

Secara keseluruhan, *Urban Farming* menggambarkan sistem produksi pangan yang terjadi di lingkungan perkotaan. Praktik yang dilibatkan *Urban Farming* ini: budidaya tanaman, pemrosesan hasil pertanian, dan distribusi bahan pangan di sekitar atau di dalam kota. Kemudian, budidaya perikanan yang berada di kolam seperti selokan pinggir jalan permukiman warga dengan mengusung konsep Akuaponik. Pernyataan tersebut memuat kutipan berita oleh (Yuana & Anshori, 2024) sebagai berikut ini:

“Kami membuat kolam dengan sistem kolam akuaponik, di selokan yang sebelumnya dibersihkan dulu, lalu kami ganti airnya. Kolam tersebut diberi batas supaya tidak tercampur dengan air selokan.” (Sumber: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/>, Diakses pada 18 November 2025).

Dalam melestarikan lingkungan sebagai upaya, *Urban Farming* turut berperan seperti pemanfaatan besarnya volume dari sampah organik. Praktik ini sekaligus mendukung terwujudnya kebersihan kian bertambah lingkungan perkotaan prinsip yang diterapkan *3R (reduce, reuse, recycle)*, karena budidaya tanaman perkotaan dapat memanfaatkan kompos organik yang diolah dari limbah rumah tangga Permana dalam (Pratiwi et al., 2021). Sampah organik yang ada di Kampoeng Oase Ondomohen seperti rumah tangga yang memiliki makanan sisa,

mereka menguraikannya dengan memberikan kepada maggot *BSF (Black Soldier Fly)* sebagai bentuk komponen peternakan.

Pada setiap kampung menghasilkan komoditas budidaya tanaman dengan jumlah yang berbeda-beda. Bergantung pada fokus pada komoditas tertentu yang dikembangkan disaat tertentu dan bergantung pada luas lahan, sehingga hasil panen tidak dapat disamakan. Hasil panen diperuntukan atau kembali kepada masyarakat meskipun pemerintah turut memberdayakan. Karena hak tersebut berada ditangan masyarakat seperti mereka memberikan hasil panen kepada masyarakat setempat bahkan dapat diperjualbelikan jika memiliki jumlah yang lebih. Perihal tersebut merupakan sebagai salah satu bentuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat lokal.

Aktivitas *Urban Farming* ini dikelola khusus oleh kelompok tani Oase Ondomohen secara bersama sehingga tidak semua warga yang mengelola, hal ini dikarenakan kegiatan *Urban Farming* bukan menjadi pekerjaan utama mereka. Sehingga tidak banyak warga yang berpartisipasi dalam kegiatan *Urban Farming*. Meskipun demikian bukan menjadi penghalang kelompok tani Oase Ondomohen mengikuti kompetisi yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Membutuhkan kekuatan dalam pendekatan emosional bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya untuk memberdayakan masyarakat yang bukan berlatar belakang seorang petani.

Pemberian bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya berupa alat untuk berkebun dan bahan yang dibutuhkan dalam pertanian perkotaan seperti pot, bibit tanaman dan sebagainya. Kemudian melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

Kampoeng Oase Odomohen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya juga memberikan pelatihan budidaya tanaman dan menjadi fasilitator sebagai perantara dengan pihak lainnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait praktik budidaya *Urban Farming*. Penerapan *Urban Farming* di Kampoeng Oase Odomohen tidak luput dari kontribusi dari pemerintah oleh untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakatnya. Adanya hasil dari *Urban Farming* yang menghasilkan berbagai macam budidaya. Sebagaimana fungsi pemerintah yaitu menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik dalam jumlah mutu, bergizi, aman, beragam dan merata.

Kelompok masyarakat yang tidak memiliki lahan menjadi penghalang dalam melakukan kegiatan bercocok tanam. Ketergantungan masyarakat pada pasokan daerah lain menjadi situasi yang perlu diperhatikan, mengingat kondisi tersebut dapat memicu ketimpangan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang harus mengalokasikan pendapatan untuk membeli kebutuhan dasar. Rata-rata masyarakat menanam sayuran, tidak memungkinkan untuk menanam padi dan jagung. Meskipun demikian praktik *Urban Farming* dengan komoditi lengkap yang ada di Kampoeng Oase Odomohen. Pada hasil panen sayur membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menghasilkannya. Sedangkan jika memetik panen melewati hasil yang ditentukan akan mengurangi kualitas sayur. Saat ini Kampoeng Oase Odomohen melakukan budidaya tanaman kangkung dan pakcoy. Kemudian untuk perikanan hasil panen kisaran waktu tiga bulan untuk bisa panen hasil dan diolah untuk dapat dikonsumsi.

Bukan hanya berhenti membuat program, saat di implementasikan selama berjalannya program tersebut tetap membutuhkan pendampingan secara khusus untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, masyarakat sebagai salah satu faktor program ini menjadi berlanjut secara konsisten atau justru menjadi tidak konsisten. Dikarenakan masyarakat masih bergantung pada figur tokoh, ketika seorang penggerak tidak aktif. Biasanya akan berdampak pada anggota kelompok tani didalamnya. Ketua RT sebagai penggerak Kampoeng dan rata-rata kelompok tani beranggotakan individu yang sudah berkeluarga dapat dikatakan cukup sedikit untuk kalangan anak muda bergabung dalam kegiatan *Urban Farming*. Keterbatasan individu bagi generasi selanjutnya yang paham dan mampu akan menjalankan budidaya secara mandiri. Berdampak pada keberlanjutan *Urban Farming* yang secara tidak langsung juga mengancam ketahanan pangan lokal.

Memperhatikan aspek keberlanjutan *Urban Farming* di Kampoeng Oase Ondomohen agar seterusnya terawat dengan konsisten dengan baik dan menguatkan ketahanan pangan tingkat lokal. Masyarakat memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam penerapan *Urban Farming* yang saling berkesinambungan. Menekankan bahwa keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat saat program diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat, kemudian respon positif dan baik yang diperoleh dari masyarakat selama pemberdayaan ini berlangsung sebagai kunci sesuai rencana terlaksananya program tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Mengingat pertumbuhan penduduk semakin meningkat pada setiap tahunnya dengan lahan yang semakin berkurang, ketika konsumsi meningkat

hingga ketergantungan pasokan eksternal akan menyulitkan masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak lebih. *Urban Farming* sebagai solusi wilayah perkotaan karena dapat mengakomodasi kebutuhan ditinjau dari posisi geografi dengan kemiringan lereng landai di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan keterbatasan lahan secara maksimal. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui dan memastikan bagaimana prosesnya untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal, melalui praktik *Urban Farming*.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Kampoeng Oase Ondomohen dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui *Urban Farming* di Kota Surabaya.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Kampoeng Oase Ondomohen dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui *Urban Farming* di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penyusunan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini diarahkan dan dibatasi pada fokus kajian yang telah ditetapkan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan masyarakat Kampoeng Oase Ondomohen dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui *Urban Farming* di Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan maupun terlibat dalam prosesnya, terutama mahasiswa, akademisi dan pemerintah dan memberikan kontribusi dalam konsep ilmu administrasi publik. Terutama terkait Pemberdayaan masyarakat Kampoeng Oase Ondomohen dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui *Urban Farming* di Kota Surabaya

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait kontribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kampoeng Oase Ondomohen Kota Surabaya melalui pemberdayaan masyarakat
2. Penelitian ini menjadi syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang bermanfaat bagi penelitian di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya proses pendidikan melalui penyediaan referensi ilmiah yang relevan, menjadi bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya, serta mendukung

pengembangan wawasan akademik bagi mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Peneliti

Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai evaluasi dalam pengembangan suatu program agar berjalan efektif dan berkelanjutan di sektor pertanian perkotaan.